

LAPORAN PENELITIAN

**KONFLIK HORIZONTAL ANTARPENDUDUK
(KASUS DI 6 DESA WILAYAH INDRAMAYU)**

Oleh:

DRS. SUDIRAH, M.Si

NIP. 131671195



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TERBUKA

OKTOBER 2003

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN-UT

1. a. Judul Penelitian : Konflik Horizontal Antarpenduduk
(kasus di 6 Desa Wilayah Indramayu)
- b. Bidang Penelitian : Bidang Ilmu
- c. Klasifikasi Penelitian : Penelitian Mandiri
- d. Bidang Ilmu : Sosiologi

2. Ketua Peneliti
 - a. Nama lengkap dan gelar : Drs. Sudirah, M.Si.
 - b. NIP : 131671195
 - c. Golongan kepangkatan : Penata Tingkat 1 (gol. III/d)
 - d. Jabatan akademik : Lektor
 - e. Fakultas/Unit Kerja : FISIP/Sosiologi

3. Anggota Peneliti : -

4. a. Periode Penelitian : April 2002 s.d. November 2002
- b. Lama Penelitian : 7 Bulan

5. Biaya Penelitian : Rp 4.383.500,00 (Empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

6. Sumber Biaya : Pusat Studi Indonesia-UT

Pondok Cabe, 7 Oktober 2003

Mengetahui,
Dekan FISIP-UT

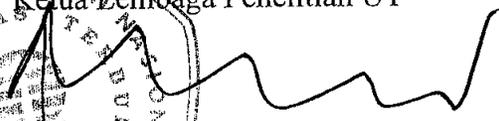

Drs. Zainul Ittihad Amin, M.Si.
NIP. 131466578

Ketua Peneliti,



Drs. Sudirah, M.Si.
NIP. 131671195

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian UT


Dr. Udin S. Winataputra, MA
NIP. 130367151

Menyetujui,
Kepala Pusat Studi Indonesia


Durri Andriani, Ph.D
NIP. 131569965

RINGKASAN

Konflik horizontal berupa tawuran massal antarpenduduk merupakan akumulasi dari ketimpangan–ketimpangan dalam menempatkan hak dan kewajiban. Konflik horizontal tersebut lebih bersifat destruktif dan anarkis, bahkan akibat yang ditimbulkannya tidak sedikit. Kondisi yang demikian amat kontras dengan tradisi dan nilai budaya bangsa kita yang dikenal sebagai bangsa yang ramah, beradab, dan beragama.

Masalahnya adalah apa yang menjadi penyebab munculnya tindakan-tindakan anarkis dan destruktif? Kemudian upaya apa yang diperlukan untuk menghindari kejadian-kejadian serupa?

Dari pembahasan terungkap bahwa penyebab munculnya konflik horizontal, yaitu:

1. Merosotnya Toleransi dan Keterbukaan

Dalam hal toleransi, di desa-desa penelitian meski sebagian besar penduduk (80%) kurang melaksanakan ibadah secara teratur, bahkan tingkat kerukunan kehidupan beragama dapat dikatakan cukup baik (66%). Namun ternyata tidak mampu meredam munculnya konflik horizontal. Pemicunya adalah kurangnya saling menghormati atau menghargai antar sesama penduduk (48%), dan kurangnya saling menghargai hak milik orang lain (50%). Kondisi demikian dapat memicu penjarahan dan pengrusakan.

Sedangkan dalam hal aspek keterbukaan antarpenduduk ternyata bahwa merasuknya media televisi ke desa-desa yang cukup baik (51%), komunikasi yang terbuka luas (62%), dan transportasi yang mudah (54%) dapat meningkatkan arus informasi, komunikasi dan mobilitas penduduk. Kemajuan (keterbukaan) di

berbagai bidang tersebut dapat pula meningkatkan pengetahuan penduduk tentang jalannya reformasi, maupun sepak terjang dari para pemimpin di negeri ini. Karena itu kurang berhasilnya reformasi (78%) di berbagai bidang terutama di bidang ekonomi (terutama kesempatan kerja), hukum (terutama keadilan dan kepastian hukum), dan keamanan (ketentraman dan perlindungan keamanan oleh aparat keamanan), kemudian kurangnya keteladanan (84%) dan kewibawaan (80%) dari para pemimpin di negeri ini dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, termasuk masyarakat di lokasi penelitian ini. Wujud dari ketidakpuasan tersebut kemudian dilampiaskan ke dalam berbagai kerusuhan massal.

2. Pudarnya Sistem Nilai Budaya

Dalam hal aspek sistem nilai budaya terungkap bahwa kurangnya kepatuhan terhadap adat istiadat/tradisi, kurangnya kerukunan, kurangnya ketenteraman, kurangnya gotong royong, kurangnya musyawarah mufakat, dan kurangnya mengutamakan kepentingan umum, yang rata-rata mencapai (47%) menunjukkan bahwa sistem nilai budaya yang merupakan pedoman tertinggi dalam perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya mengalami kemerosotan (pudar) di kalangan penduduk ini. Pudarnya sistem nilai budaya tersebut dapat memicu munculnya konflik horizontal.

3. Sikap Mental (Attitude) Destruktif/Anarkis

Dalam hal aspek sikap mental destruktif dan anarkis terungkap bahwa cukup tingginya perilaku “bringas” (kasar), cukup tingginya sikap arogansi (sombong), dan cukup tingginya persaingan yang tak sehat, yang rata-rata mencapai (51%) menunjukkan bahwa sikap mental destruktif dan anarkis yang berupa kerusuhan massal, penjarahan, dan mencederai pihak lain (bahkan sampai ada yang

terbunuh) yang merupakan perilaku yang tak terpuji itu sudah merasuk di kalangan penduduk ini.

4. Krisis Akhlak atau Moral

Ternyata bahwa dalam aspek kesadaran tentang norma/moral, tetapi bertindak menentangnya (*immoral*) di lokasi penelitian ini cukup besar (58%). Demikian pula halnya dalam hal aspek hilangnya kesadaran tentang nilai baik dan buruk (*amoral*), ternyata cukup besar pula mencapai sekitar 43%. Yang menarik adalah cukup besarnya kesadaran tentang perilaku baik dan buruk (46%), ternyata tidak diikuti dengan tindakannya.

5. Kesenjangan Sosial ekonomi

Fokus utama seluruh aktivitas sosial adalah konflik atas tanah, sumber daya, kemakmuran, alat produksi, air, perumahan, pendidikan, dan sebagainya. Kepemilikan tanah yang tidak seimbang (polarisasi), dan ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya dapat memunculkan kesenjangan sosial ekonomi.

Kesenjangan ekonomi dapat pula terjadi sebagai akibat meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan tersedianya lapangan kerja. Kesenjangan sosial ekonomi tersebut pada akhirnya memunculkan konflik horizontal.

Di lokasi penelitian ini ada 3 hal yang dilakukan dalam penanganan konflik horizontal, yaitu:

1. Konsiliasi

Dalam proses konsiliasi ini kedua pihak yang berselisih meminta bantuan kepada pihak ketiga (aparatus Desa, aparat kecamatan, aparat kepolisian, dan

tokoh-tokoh masyarakat) untuk memberikan berbagai pertimbangan yang dianggap baik bagi kedua belah pihak untuk menghentikan sengketanya.

Hasil perdamaian itu menghasilkan kesepakatan yang intinya menyerukan perdamaian sekaligus menghentikan segala bentuk kekerasan, khususnya di desa-desa yang mengalami pertikaian.

2. Mediasi

Di sini mediator memberikan konsultasi kepada pihak-pihak yang bertikai, jadi perannya lebih bersifat konsultatif, dan tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak-pihak yang bersengketa itulah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan. Jadi peran mediator di sini hampir sama dengan peran konsiliator.

3. Detente

Bentuk penanganan konflik lainnya yang pernah dilakukan di lokasi penelitian ini adalah dengan cara *detente* (mengendorkan), yaitu mengurangi hubungan tegang antara dua pihak yang bertikai. Model penyelesaian konflik ini dilakukan sebagai persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah-langkah mencapai perdamaian. Dengan demikian belum ada penyelesaian yang bersifat definitif, karena belum ada pihak yang dinyatakan menang atau kalah. Dalam perang fisik, *detente* ini sering disebut sebagai *gencatan senjata*.

Oleh karena itu untuk menghindari terjadi konflik horizontal perlu mengembangkan kerjasama terus-menerus di kalangan masyarakat dengan berlandaskan pada nilai-nilai universal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. Atas rahmat dan karunianya, akhirnya laporan penelitian yang berjudul KONFLIK HORIZONTAL ANTARPENDUDUK (Kasus di 6 desa Wilayah Indramayu) dapat diselesaikan.

Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Semua aparat desa di desa Margamulya, Sidamulya, Cipedang, Drunten Wetan, Drunten Kulon, dan Curug,
2. Semua aparat kecamatan di kecamatan Bongas, Gabus Wetan dan Kandanghaur,
3. Para tokoh masyarakat di keenam desa tersebut,
4. Para responden di keenam desa tersebut,
5. Petugas Polsek Bongas, Gabus Wetan Dan Kandanghaur, dan
6. Semua pihak yang membantu selesainya laporan ini,

Atas data dan informasi, yang Ibu/Bapak berikan. Semoga laporan penelitian ini ada manfaatnya.

Pondok Cabe, 7 Oktober 2003

Peneliti,

Sudirah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR, TABEL	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Masalah Penelitian	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Studi Literatur	4
1. Munculnya Konflik	4
2. Konflik Sosial Dalam Paradigma Sosiologi	8
3. Konflik Sosial Vertikal dan Horizontal	9
BAB II. METODE PENELITIAN	11
A. Rancangan Penelitian	11
B. Lokasi Penelitian	11
C. Populasi dan Sampel	12
D. Pengumpulan Data	12
E. Analisis Data	13
BAB III. KARAKTERISTIK PENDUDUK	14
A. Tingkat Pendidikan Penduduk	14
B. Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk	15
C. Perubahan Struktur Umur Penduduk	16
D. Mata Pencarian Penduduk	17
BAB IV. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG KONFLIK HORIZONTAL ANTARPENDUDUK	19
A. Faktor Pendorong	19
1. Merosotnya Toleransi dan Keterbukaan	21
2. Pudarnya Sistem Nilai Budaya	27
3. Sikap Mental (Attitude) Destruktif dan Anarkis	32
4. Krisis Akhlak Atau Moral	32
5. Kesenjangan Sosial Ekonomi	34
B. Akibat Konflik Horizontal	36

BAB V. UPAYA PENANGANAN KONFLIK HORIZONTAL ANTARPENDUDUK	38
A. Konsiliasi	43
B. Mediasi	44
C. Detente	46
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53

Universitas Terbuka

DAFTAR GAMBAR, TABEL

A. Gambar: Alur konflik Horizontal	36
B. Tabel	
1. Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Di 6 Desa Menurut Tingkat Pendidikan	14
2. Tabel 3.2 Pertumbuhan Penduduk Di 6 Desa Antara 1992-2002	15
3. Tabel 3.3 Kepadatan Penduduk (km ²) Di 6 Desa 1992-2002	16
4. Tabel 3.4 Perubahan Struktur Umur Penduduk Di 6 Desa Tahun 1992	16
5. Tabel 3.5 Perubahan Struktur Umur Penduduk Di 6 Desa Tahun 2002	17
6. Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Di 6 desa Menurut Mata Pencarian	17
7. Tabel 3.7 Pertumbuhan Tenaga Kerja Di 6 Desa Tahun 192-2002	18
8. Tabel 4.1 Toleransi AntarPenduduk	25
9. Tabel 4.2 Keterbukaan Antar Penduduk	26
10. Tabel 4.3 Sistem Nilai Budaya Penduduk	31
11. Tabel 4.4 Sikap Mental (Attitude) Destruktif dan Anarkis Penduduk	32
12. Tabel 4.5 Akhlak atau Moral Penduduk	33
13. Tabel 4.6 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Pekerjaan Tahun2001	35
14. Tabel 4.7 Macam Korban (harta) dan Jumlah Kerugian Akibat Konflik Horizontal	36
15. Tabel 4.8 Macam Korban (Manusia) Akibat konflik Horizontal	37

Universitas Terbuka

KONFLIK HORIZONTAL ANTARPENDUDUK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Konflik multi kultural ataupun multi dimensional yang mencuat dalam berbagai kejadian yang memprihatinkan dewasa ini bukanlah sebuah konflik yang muncul begitu saja, akan tetapi merupakan akumulasi dari ketimpangan-ketimpangan dalam menempatkan hak dan kewajiban yang cenderung ditutup-tutupi. Konflik merupakan benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, yang disebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan, dan kelangkaan sumber daya. Konflik dan kehidupan manusia sangatlah sulit untuk dipisahkan dan keduanya berada bersama-sama, karena perbedaan nilai, status, kekuasaan dan keterbatasan sumber daya itu memang *given*. Konflik akan selalu dijumpai dalam kehidupan manusia atau kehidupan masyarakat, sebab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia melakukan berbagai usaha yang dalam pelaksanaannya selalu dihadapkan pada sejumlah hak dan kewajiban.

Bahkan hingga dua tahun terakhir ini (2000-2002) konflik sosial berupa tawuran massal antarpenduduk merupakan fenomena sosial yang masih sering kita saksikan. Konflik yang berkembang cenderung bersifat *horizontal* antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Hal yang mengkhawatirkan menurut Yuyun Muliana (Asisten Bimbingan Masyarakat Kapolri) adalah tawuran massal antar penduduk tersebut tidak kunjung mereda,

bahkan yang lebih menggelisahkan adalah kualitasnya yang kian meningkat dari tahun ke tahun (Republika, 30 Agustus 1999, hal.9).

Ada tendensi konflik horizontal tersebut lebih bersifat destruktif dan anarkis, bahkan akibat yang ditimbulkannya tidak sedikit. Banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggal, karena dibakar atau dirusak massa penyerang, harta benda yang ada di dalam rumahnya yang berupa peralatan atau perabotan rumah tangga menjadi rusak atau hilang dijarah oleh massa penyerang. Bahkan tidak hanya harta benda, jiwapun terkadang ikut menjadi korban. Tidak hanya itu saja sarana-sarana umumpun banyak mengalami kehancuran, lebih-lebih lagi ribuan anak kehilangan masa depan karena tempat sekolah mereka terbakar dan mata pencaharian orang tuanya tidak ada lagi. Kondisi yang demikian amat kontras dengan tradisi dan nilai budaya bangsa kita yang dikenal sebagai bangsa yang ramah, beradab, dan beragama.

Konflik massal tersebut terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Kupang, Pontianak, Ambon, Jakarta (Kelurahan Matraman dengan Berlan, kelompok-kelompok di Manggarai), Cirebon, dan Indramayu. Memang konflik bisa terjadi dimana-mana (Sunarto, 1993:241). Menurut Coser (1964:8) salah seorang pakar tentang teori konflik modern, konflik sosial didorong oleh perjuangan dari kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan berlainan atau bahkan mungkin bertentangan tentang nilai (moral), tuntutan atas status (sosial ekonomi), tuntutan atas kekuasaan dan tuntutan atas sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan.

Pertanyaan yang relevan dalam konteks penelitian ini adalah apakah yang menjadi penyebab munculnya tindakan-tindakan anarkis dan destruktif yang begitu menggejala dalam beberapa tahun terakhir ini didorong oleh adanya perjuangan tentang nilai (moral), tuntutan atas status (sosial ekonomi), tuntutan atas kekuasaan, dan tuntutan atas sumber daya yang langka? Kemudian upaya apa yang diperlukan untuk menghindari agar kejadian-kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang?

B. Masalah Penelitian

Dari gambaran singkat tersebut di atas, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab munculnya tawuran massal antara penduduk tersebut? Dalam hal ini dibatasi pada peristiwa tawuran massal antara penduduk yang terjadi dalam dua tahun terakhir (2000-2002).
- (2) Upaya apa saja yang diperlukan agar tawuran massal antara penduduk tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

- (1) Mengidentifikasi penyebab terjadinya tindakan anarkis dan destruktif tawuran massal.
- (2) Menginventarisasi upaya-upaya yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

D. Kegunaan

- (1) Memperluas pemahaman tentang konflik sosial yang berupa tawuran massal dan upaya-upaya penanggulangannya.
- (2) Memberi masukan kepada pemerintah, kepolisian, dan aparat terkait lainnya tentang penyebab munculnya konflik massal tersebut, sekaligus bagaimana upaya mengantisipasinya.

E. Studi Literatur

(1) Munculnya Konflik

Paling tidak ada 4 fenomena sosial yang mendasari munculnya konflik, yaitu:

Pertama, kedudukan orang-orang di dalam kelompok atau masyarakat tidak sama, karena ada pihak yang berkuasa dan ada pihak yang tergantung.

Kedua, perbedaan kedudukan menimbulkan kepentingan yang berbeda. Yang satu berhasil dengan kedudukannya yang tinggi, mempertahankannya, memakai kesempatan-kesempatan khusus yang berkaitan dengan jabatannya, mengontrol arus informasi dan mampu membalas jasa-jasa dari mereka yang setia supaya lebih setia lagi. Pihak yang satu cenderung konservatif. Mereka berkepentingan dengan kedudukannya. Pihak kedua tidak dapat bergerak, senantiasa merasa diri terancam, menunggu sambil mencari kesempatan untuk mengubah status (misalnya kenaikan gaji), tidak menguasai informasi yang bersifat istimewa (privileged information), merasa iri terhadap pihak yang menikmati kemudahan-kemudahan yang dibiayai pihak lain.

Ketiga, mula-mula sebagian kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda itu

tidak disadari dan karenanya dapat disebut kepentingan tersembunyi (latent interests), yang tidak akan memicu aksi. Misalnya berabad-abad lamanya bangsa-bangsa yang pernah dijajah, tidak menyadari kepentingannya dan dininabobokan oleh ideologi-ideologi palsu. Tetapi apabila latent interests itu menjadi manifest interests, kedua belah pihak mulai bertindak. Pihak yang menyadari ketertindasannya mengorganisir diri ke dalam kelompok-kelompok seperti partai politik, serikat kerja dan lain-lain, masing-masing dengan program perjuangan, ideologi, dan alat-alat komunikasi sendiri. Pihak yang berkuasa juga mulai bertindak dengan menahan orang-orang tertentu, mengendalikan pers, larangan untuk berkumpul, dan sebagainya. Kedua kelompok kepentingan sekarang terlibat ke dalam konflik yang terus-menerus, yang satu mempertahankan *status quo* sementara yang lain mengubahnya.

Keempat, konflik itu akan berhasil membawa perubahan dalam struktur sosial, kalau kondisi-kondisi tertentu telah dipenuhi, yaitu: Kondisi-kondisi yang menyangkut keorganisasian, seperti: (1) Komunikasi yang efektif, pengerahan dan penempatan tenaga yang tepat; (2) Kesempatan dan kebebasan berasosiasi; (3) Tersedianya perintis (pendiri), pemimpin dan ideologi. Selain itu juga kondisi-kondisi yang menyangkut konflik sendiri, seperti: (1) Adanya mobilitas sosial, sehingga individu atau kelompok secara realistis dapat memperjuangkan perubahan sosial; (2) Mekanisme/sarana-sarana efektif dalam menangani dan mengatur konflik sosial.

Coser mulai mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status, kemudian perjuangan terhadap kekuasaan dan selanjutnya sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau

dieliminir saingan-saingannya. Coser menyatakan bahwa konflik sosial seringkali diabaikan oleh para ahli sosiologi, karena mereka cenderung menekankan pada sisi yang negatif, yakni meremehkan tatanan, stabilitas, dan persatuan. Singkatnya, konflik sosial menggambarkan suatu keadaan yang terpecah belah. Coser ingin memperbaikinya dengan cara menekankan pada sisi konflik yang positif, yakni bagaimana konflik itu dapat memberi sumbangan pada ketahanan dan adaptasi dari kelompok, interaksi, dan sistem sosial. Meskipun definisi konflik sosial yang dikemukakan Coser memfokuskan pada adanya pertentangan, perjuangan memperoleh sumber daya, yakni dimana setiap orang berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari orang lain, namun di dalam menafsirkannya Coser menyatakan bahwa konflik itu bersifat fungsional (baik) dan bersifat disfungsional (buruk) bagi hubungan-hubungan dan struktur-struktur yang tidak terangkum dalam sistem sosial sebagai suatu keseluruhan.

Menurut teori konflik, kesatuan masyarakat yang berdasarkan integrasi dan kesanggupan orang untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan struktur-struktur yang ada dan memainkan peranan mereka masing-masing sebagaimana mestinya, hanyalah merupakan penampakan saja. Masyarakat hanya tampak berintegrasi dan bersepakat tentang nilai-nilai dasar. Pada hakekatnya masyarakat terbagi ke dalam kubu-kubu yang saling berlawanan. Sebenarnya konflik - sekalipun tersembunyi, tidak terbuka - mencirikan masyarakat. Apa yang disebut "kestabilan" merupakan keadaan yang hanya nampak pada permukaan, dan dihasilkan oleh pihak yang berkuasa, yang memaksakannya pada rakyat dan penguasa cepat bertindak bila muncul tanda-tanda pergolakan. Teori konflik tidak bertolak dari masalah, "apakah yang mempersatukan

masyarakat?", tetapi dari "apakah yang mendorong dan menggerakkan masyarakat?". Bukan nilai-nilai bersama yang diutamakan, tetapi kepentingan-kepentingan, persaingan, pemojokkan orang lain, siasat mengadu domba, dan sebagainya.

Teori konflik menyatakan bahwa barang yang berharga, benda-benda material, dan apa yang menghasilkan kenikmatan merupakan barang-barang yang tergolong langka, sehingga tidak dapat dibagi sama rata di antara rakyat. Maka telah muncul golongan-golongan dan kelompok-kelompok oposisi, yang merasa diri dirugikan dan menginginkan porsi lebih besar bagi dirinya sendiri. Mereka ini hendak menghalang-halangi/mencegah pihak lain memperoleh atau menguasai barang itu. Tiap kehidupan bersama memperlihatkan garis pemisah antara pihak yang berkelimpahan dengan pihak yang berkekurangan.

Teori konflik bermaksud menerangkan antagonisme atau ketegangan antara penguasa dengan pihak yang dikuasai dalam rangka pengorganisasian struktur tertentu. Bukan konflik individual, melainkan konflik sosial yang berdasarkan struktur sosial tertentu. Kekuasaan menurut Max Weber merupakan sifat-sifat dan kondisi-kondisi seseorang yang memberi kemungkinan kepadanya untuk memaksakan kemauannya pada orang lain, sekalipun orang lain itu tidak setuju. Sedangkan wewenang diartikan sebagai kemungkinan bagi seseorang bahwa suatu perintahnya akan ditaati oleh orang-orang tertentu. Perbedaan utama antara kekuasaan dan wewenang adalah bahwa kekuasaan lebih diakarkan pada sifat diri pribadi orang yang berkuasa. Sedangkan wewenang harus dikaitkan dengan posisi resmi atau peranan sosial, yang telah diberikan kepada orang yang bersangkutan. Seorang penghasut yang didukung oleh orang bersenjata mungkin

mempunyai kekuasaan atas rakyat yang tidak berdaya. Sebaliknya seorang perwira, direktur, gubernur, dan sebagainya yang mengeluarkan instruksi kepada bawahannya mempunyai wewenang. Dalam contoh kedua ini ketaatan yang didapat tidak didasarkan ciri-ciri diri pribadi orang, melainkan didasarkan pada kedudukannya atau jabatannya.

(2) Konflik Sosial dalam Paradigma Sosiologi

Teori fungsionalisme struktural menilai bahwa fakta atau realita sosial adalah bersifat fungsional. Sedangkan teori konflik menyoroti bahwa fakta sosial berupa wewenang dan posisi justru merupakan sumber pertentangan sosial.

Wewenang dan posisi merupakan konsep utama dari teori konflik. Menurut teori konflik, ketidakmerataan distribusi kekuasaan dan wewenang otomatis akan menempatkan masyarakat pada posisi yang saling berbeda. Perbedaan posisi itu dapat memicu timbulnya konflik dalam masyarakat.

Ide pokok dari teori konflik dapat dirinci menjadi tiga, yaitu: pertama, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan adanya pertentangan terus-menerus. Kedua, setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial dan ketiga, keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa.

Sehubungan dengan faktor-faktor penyebab timbulnya konflik di masyarakat, terutama yang disebabkan oleh adanya perbedaan posisi dan wewenang, maka dibuat analisis teori konflik sebagai berikut:

Konflik sosial bersumber dari adanya distribusi kekuasaan yang tidak merata. Alasannya memang tidaklah memungkinkan untuk dilakukan distribusi kekuasaan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu maka konflik akhirnya menjadi suatu keniscayaan sesuatu hal yang pasti, nyata dalam masyarakat. Konflik juga dapat berasal dari perilaku individu sebagai pihak yang dikuasai terhadap sangsi yang diberikan oleh pihak yang sedang berada pada posisi menguasai.

Konflik merupakan fungsi dari adanya pertentangan antara penguasa dengan yang dikuasai, dimana penguasa senantiasa ingin mempertahankan seperangkat fasilitas yang melekat pada kekuasaannya, sedangkan yang dikuasai terobsesi untuk mewujudkan perubahan status ke arah yang lebih baik.

(3) Konflik Sosial Vertikal dan Horizontal

Konflik sosial secara teoritis dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu konflik sosial vertikal dan konflik sosial horizontal. Konflik sosial vertikal, yakni konflik yang terjadi antara masyarakat dan negara. Di Indonesia konflik sosial vertikal ini dapat bersifat laten karena benih-banih perselisihan sudah ada sejak lama yang ketika itu dapat berhasil diredam oleh pihak penguasa dengan menggunakan pendekatan keamanan. Melalui tindakan pendekatan keamanan, pihak penguasa mengharapkan konflik vertikal tidak muncul kepermukaan, sehingga terkesan hubungan antara pemerintah dengan rakyat harmonis. Dengan demikian seolah-olah stabilitas politik terjaga dan tidak ada masalah dalam kehidupan bernegara. Proses marginalisasi dan pemiskinan terjadi selama cara seperti itu diterapkan. Hal ini menyebabkan konflik vertikal ibarat gunung es.

Konflik sosial horizontal biasanya terjadi karena adanya konflik antar etnis, suku, golongan (agama), atau antar kelompok masyarakat (antarkampung, antardesa, dan lain-lain). Selama pemerintahan orde baru berkuasa, ada dugaan konflik sosial horizontal ini sengaja diciptakan untuk kepentingan elit yang berkuasa dan di sini militer merupakan alat legitimasi dalam rangka memperkuat untuk pengontrolan di sekitar daerah konflik dengan dalih menjaga keamanan. Namun di balik itu sebenarnya ada kepentingan ekonomi dan politik. Bahkan konflik antar pemeluk agamapun sangat terkesan sengaja direkonstruksi untuk kepentingan para penguasa sebagai upaya membatasi gerak elit politik dari kelompok agama tertentu.

Selain itu konflik horizontal lainnya adalah konflik antara pribumi dan non pribumi. Pemicunya dilatarbelakangi oleh kecemburuan sosial yang memang sudah terbentuk sejak masa kolonial. Pada masa kolonial konflik ini sengaja diciptakan sebagai strategi politik *divide et impera*, yakni politik adu domba atau pemecah belah masyarakat. Akan tetapi belakangan ini konflik antara pribumi dan non pribumi selain dipicu oleh kecemburuan sosial, juga dilatarbelakangi oleh sikap loyalitas pada negara serta didorong pula oleh kebijaksanaan pemerintahan rezim orde baru yang cenderung memihak pedagang atau pengusaha non pribumi. Tidak mengherankan bila konflik horizontal ini dapat muncul ke permukaan setiap saat.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologis. Peneliti berusaha memahami fenomena konflik horizontal dari sudut pandang subjek yang diteliti Moleong, (2000:9-10), Penelitian ini difokuskan pada aspek toleransi, keterbukaan, sistem nilai budaya, sikap mental, akhlak, moral, dan kesenjangan sosial, berdasarkan situasi, kondisi, dan tempat peristiwa itu terjadi.

Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran sejauhmana aspek-aspek tersebut mendorong munculnya konflik sosial horizontal. Selain itu akan dikaji pula upaya-upaya penanggulangan konflik yang pernah dilakukan selama ini untuk mendapatkan suatu formula yang lebih tepat bagi pemecahan masalah konflik serupa yang mungkin muncul kembali di masa mendatang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 6 desa masing-masing: 3 desa di kecamatan Bongas, yaitu Desa Margamulya, Sidamulya dan Cipedang; 2 desa di kecamatan Gabuswetan, yaitu Desa Drunten Wetan dan Drunten Kulon, dan 1 desa di kecamatan Kandanghaur, yaitu Desa Curug. Keenam desa tersebut termasuk di wilayah Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena peristiwa-peristiwa tawuran massal antarpenduduk kerap kali terjadi dan memiliki tingkat kualitas yang cukup tinggi.

C. Populasi dan Sampel

Populasinya adalah seluruh penduduk yang terlibat atau yang menjadi korban (material maupun non material) yang ada di 6 desa di wilayah kabupaten Indramayu, yaitu Desa Margamulya, Sidamulya, Cipedang, Drunten Wetan, Drunten Kulon, dan Curug. Keenam desa tersebut kerap kali mengalami peristiwa tawuran massal antar penduduk.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah pengambilan sampel purposif. Sampel yang diambil adalah penduduk yang terlibat atau menjadi korban tawuran massal tersebut. Untuk mengetahui penduduk yang memenuhi karakteristik tersebut, penulis menghubungi Kepala Desa/aparat desa atau informan. Jumlah sampel yang diambil 60 responden.

D. Pengumpulan Data

Data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden penduduk yang terlibat atau menjadi korban tawuran massal, dan informan (tokoh-tokoh masyarakat atau aparat dari instansi yang terkait). Pengambilan data responden dan informan selain dilakukan dengan memberikan instrumen kuesioner, juga dilakukan dengan wawancara langsung dengan berpedoman pada topik-topik penelitian. Pertanyaan dikembangkan kembali pada bagian-bagian yang penting dari responden dan informan yang bersangkutan, sehingga diperoleh data atau informasi yang bersifat deskriptif (data kualitatif). Selain menggali data primer dari sudut pandang subjek penelitian (fenomenologis), peneliti menggali juga data sekunder dari instansi yang terkait untuk mendukung analisis penelitian ini.

E. Analisa Data

Analisa data kuantitatif dilakukan dengan statistik sederhana, yaitu statistik distribusi frekuensi. Sedangkan analisa data kualitatif, dilakukan dengan pengkajian data atau informasi secara menyeluruh, membuat rangkuman hasil wawancara, kemudian mengelompokkan ke dalam aspek-aspek tertentu untuk mendukung data kuantitatif.

Setelah itu dibuat beberapa tabel data dasar sebagai berikut: (1) jumlah peristiwa, jenis kerusakan, dan jumlah kerugian (material maupun non material) yang dialami penduduk akibat tawuran massal (2) menginventarisir jumlah kerusakan fasilitas umum akibat peristiwa tawuran massal tersebut. Selanjutnya penulis mengolah kembali data tersebut untuk memudahkan interpretasi. Terakhir menarik kesimpulan.

Universitas Terbuka

BAB III KARAKTERISTIK PENDUDUK

Dalam pembahasan tentang karakteristik penduduk ini dikemukakan aspek-aspek sebagai berikut:

- A. Tingkat pendidikan penduduk.
- B. Pertumbuhan dan kepadatan penduduk
- C. Perubahan struktur umur penduduk
- D. Mata pencaharian penduduk

A. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk di 6 Desa Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Mgmulya	Sdmulya	Cipedang	Drunt W	Drunt K	Curug
		Jumlah (%)					
1	Buta aksara	130 (2)	115 (2)	118 (2)	94 (1)	102 (1)	122 (2)
2	Tidak tamat SD	2.026 (28)	1.908 (28)	2054 (31)	2.094 (29)	1.805 (25)	1.602 (28)
3	SD/ sederajat	3.250 (45)	2.896 (42)	2908 (43)	3.328 (45)	2.804 (40)	2.605 (45)
4	SMTP/ sederajat	1.362 (19)	1.405 (21)	1248 (18)	1.405 (18)	1.896 (27)	1.140 (19)
5	SMTA/ sederajat	279 (4)	346 (5)	264 (4)	402 (5)	385 (5)	208 (4)
6	Diploma/ sederajat	48 (1)	62 (1)	42 (1)	74 (1)	62 (1)	46 (1)
7	Sarjana	26 (1)	36 (1)	28 (1)	65 (1)	54 (1)	32 (1)
	Jumlah	7.121 (100)	6.768 (100)	6.662 (100)	7.462 (100)	7.108 (100)	5.755 (100)

Sumber: Potensi Desa 2001/2002, diolah kembali.

Di sini dikemukakan data tingkat pendidikan penduduk di keenam desa penelitian seperti jenjang pendidikan tertinggi yang dicapai. Penemuan penting jenjang pendidikan penduduk di desa penelitian adalah bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk mengalami kemajuan mencapai sekitar 5% untuk tingkat SMTA, dan mencapai sekitar 2% untuk tingkat di atas SMTA (diploma dan sarjana). Ini artinya bahwa sumber daya manusia di desa-desa tersebut mencapai kemajuan yang cukup baik. Diharapkan dari kelompok "intelektual" desa ini dapat menjadi *change agent* bagi kemajuan desanya (Tabel 3.1).

B. Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Tabel 3.2 Pertumbuhan Penduduk Di 6 Desa Antara 1992-2002

No.	Desa	1992	2002	1992-2002
1.	Margamulya	2,20 %	3,21 %	23 %
2.	Sidamulya	2,56 %	3,68 %	21 %
3.	Cipedang	2,45 %	2,62 %	23 %
4.	Drunten Wetan	3,10 %	2,62 %	22 %
5.	Drunten Kulon	2,60 %	3,08 %	23 %
6	Curug	2,80 %	2,55 %	20 %

Sumber: Potensi Desa 1991/1992 dan 2001/2002, diolah kembali

Pertumbuhan penduduk di keenam desa penelitian tersebut selama 10 tahun ini (1992-202) berkisar antara 20 hingga 23 % atau rata-rata lebih dari 2,1 % per tahun (Tabel 3.2). Sedangkan pertumbuhan penduduk kabupaten Indramayu rata-rata sekitar 1,01 % per tahun, dan pertumbuhan penduduk Jawa Barat rata-rata sekitar 2,35% setahun. Hal ini berarti bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di 6 desa tersebut lebih tinggi dari pada pertumbuhan penduduk kabupaten Indramayu. Demikian pula bila dibandingkan dengan tingkat propinsi (Jawa Barat), pertumbuhan penduduk di 6 desa tersebut masih lebih tinggi.

Di tingkat kabupaten, sejak dari dua dekade yang lalu daerah Indramayu telah mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. Pesatnya pertumbuhan ini adalah disebabkan oleh terjadinya berbagai jenis aktivitas ekonomi terutama dari eksplorasi minyak dan gas bumi, perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Sejalan dengan pertumbuhan di berbagai sektor tersebut jumlah pendudukpun mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. Tingkat kelahiran atau *total fertility rate* (TVR) Kab. Indramayu terhitung tinggi di Jabar. Tingkat kelahiran itu mencapai 2,09 persen dan tercatat tertinggi ke-3 di Jawa Barat. TVR ini juga mendorong laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang relatif tinggi mencapai 1,01 persen. Kepala BKKBN Indramayu, Drs. H. Dedy Suwesdi Sutangsa, M.D.A. mengemukakan 2,09 persen TVR merupakan salah satu problem kependudukan di Indramayu. BKKBN sendiri berusaha untuk terus menekan TVR sampai di bawah 2 persen, serta LPP di bawah 1 persen dari total penduduk 1,7 juta jiwa. Salah satu penyebab tingginya TVR dan LPP, yaitu banyaknya yang kawin muda serta kawin cerai. Cukup banyak perkawinan terjadi pada usia di bawah 17 tahun, termasuk juga kawin cerai yang terhitung paling tinggi di Jawa Barat maupun di Indonesia. Untuk menekan TVR dan LPP, BKKBN gencar mensosialisasikan penundaan perkawinan dan penundaan kelahiran anak pertama.

Tidak hanya di tingkat kabupaten, di tingkat desa pun masalah pertumbuhan penduduk yang pesat dan kepadatan penduduk yang cukup besar ini telah menimbulkan berbagai masalah. Berbagai implikasi negatif telah timbul akibat kepadatan penduduk tersebut sehingga menyebabkan berbagai masalah pengangguran, dan kesenjangan ekonomi.

Tabel 3.3 Kepadatan Penduduk (km²) di 6 Desa 1992 dan 2002

No	Desa	1992 (Jiwa)	2002 (Jiwa)
1.	Margamulya	765	805
2.	Sidamulya	740	790
3.	Cipedang	715	748
4.	Drunten Wetan	775	820
5.	Drunten Kulon	710	765
6.	Curug	605	670

Sumber: Potensi Desa 1991/1992, dan 2001/2002, diolah kembali.

Dari 6 desa tersebut tingkat kepadatan penduduknya rata-rata di atas 700 jiwa per km², kecuali desa Curug rata-rata 605 jiwa per km² (Tabel 3.3). Sedangkan kepadatan penduduk kabupaten Indramayu rata-rata sekitar 602 jiwa per km², dan kepadatan penduduk Jawa Barat rata-rata mencapai 714 jiwa per km². Hal itu berarti bahwa di keenam desa tersebut tingkat kepadatan penduduknya melampaui rata-rata tingkat kepadatan penduduk kabupaten Indramayu, maupun propinsi Jawa Barat.

C. Perubahan Struktur Umur Penduduk

Struktur umur penduduk dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu *pertama*, kelompok umur kurang dari 14 tahun; *kedua*, kelompok umur 15 sampai dengan 64 tahun, dan *ketiga*, kelompok umur 65 tahun atau lebih. Kelompok umur pertama dan ketiga dianggap sebagai kelompok umur yang kurang produktif, sedangkan kelompok umur yang kedua dianggap sebagai kelompok umur yang produktif.

Kelompok tidak produktif secara ekonomi tergantung terhadap kelompok usia produktif. Tahun 1992 di keenam desa penelitian tersebut, jumlah kelompok umur pertama rata-rata sekitar 31%, dan kelompok umur ketiga rata-rata sekitar 2,5%. Dengan demikian tingkat ketergantungan penduduk di 6 desa ini pada tahun 1992 mencapai sekitar 33,5%. Sedangkan usia produktif mencapai rata-rata sekitar 66,5% (Tabel 3.4).

Tabel 3.4 Perubahan Struktur Umur Penduduk Di 6 Desa Tahun 1992

No	Desa	< 14 tahun	15-64 tahun	>65 tahun
1.	Margamulya	32,5 %	65 %	2,5 %
2.	Sidamulya	30 %	66,5 %	3 %
3.	Cipedang	31,5 %	66 %	2,5 %
4.	Drunten Wetan	32 %	64,5 %	3,5 %
5.	Drunten Kulon	32 %	65,5 %	2,5 %
6.	Curug	31 %	66,5 %	2,5 %

Sumber: Potensi Desa 1991/1992, diolah kembali.

Sedangkan tahun 2002 jumlah kelompok umur pertama rata-rata sekitar 32%, dan kelompok umur ketiga rata-rata sekitar 3%. Dengan demikian tingkat ketergantungan penduduk di 6 desa ini pada tahun 2002 mencapai sekitar 35%

lebih tinggi dari pada tingkat ketergantungan tahun 1992. Sedangkan usia produktif mencapai rata-rata sekitar 65% (Tabel 3.5).

Tabel 3.5 Perubahan Struktur Umur Penduduk Di 6 Desa Tahun 2002

No	Desa	< 14 tahun	15-64 tahun	>65 tahun
1.	Margamulya	32 %	64,5 %	3 %
2.	Sidamulya	31 %	65,5 %	3,5 %
3.	Cipedang	32 %	65 %	3 %
4.	Drunten Wetan	33 %	63,5 %	3,5 %
5.	Drunten Kulon	32 %	65 %	3 %
6.	Curug	32 %	65 %	3 %

Sumber: Potensi Desa 2001/2002, diolah kembali.

D. Mata Pencaharian Penduduk

Dari 8 kelompok mata pencaharian penduduk di 6 desa penelitian ini yang tergolong 3 kelompok besar, yaitu sebagai buruh, petani dan pertukangan, masing-masing berkisar antara 27 – 21% (Tabel 3.6).

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Di 6 Desa Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Mgmulya	Sdmulya	Cipedang	Drun W	Drun K	Curug
		Jumlah (%)					
1	PNS dan ABRI	71 (3)	66 (3)	56 (2)	76 (3)	68 (3)	59 (3)
2	Pegawai swasta	168 (6)	148 (6)	185 (8)	192 (7)	164 (6)	198 (9)
3	Pedagang	174 (6)	184 (7)	162 (7)	190 (7)	160 (6)	204 (9)
4	Petani	601 (22)	624 (23)	542 (23)	574 (22)	612 (24)	458 (21)
5	Buruh	706 (27)	715 (27)	644 (27)	662 (26)	688 (27)	566 (26)
6	Ojeg	158 (6)	140 (5)	122 (5)	162 (6)	120 (5)	92 (4)
7	Pertukangan	194 (7)	174 (7)	158 (7)	178 (7)	144 (6)	122 (5)
8	Jasa lainnya	616 (23)	580 (22)	488 (21)	570 (22)	594 (23)	498 (23)
	Jumlah	2.688 (100)	2.631 (100)	2.357 (100)	2.604 (100)	2.550 (100)	2.197 (100)

Sumber: Potensi Desa 2001/2002

Tingkat pertumbuhan tenaga kerja dalam 10 tahun ini (1992-2002), mengalami peningkatan rata-rata 2% lebih per tahun atau rata-rata sekitar 22% (Tabel 3.7). Pada umumnya tingkat pertumbuhan ini berada di atas rata-rata pertumbuhan di tingkat kabupaten atau propinsi.

Hal ini terjadi di samping disebabkan oleh pertumbuhan penduduknya yang cukup pesat, juga karena banyak tenaga kerja (usia kerja) yang tidak bisa tertampung di dunia kerja (pengangguran). Memang terdapat sejumlah tenaga yang bekerja di kota (migrasi musiman), yaitu sebagai buruh di pabrik-pabrik,

buruh bangunan, pertukangan, jasa transportasi (sebagai supir atau pengojek sepeda motor). Selain itu banyak juga yang bekerja di luar negeri terutama di Arab dan Taiwan sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI).

Tabel 3.7 Pertumbuhan Tenaga Kerja Di 6 Desa 1992-2002

No.	Desa	1992 (Jiwa)	2002 (Jiwa)	1992-2002 (%)
1.	Margamulya	2.069	2.544	23 %
2.	Sidamulya	2.078	2.514	21 %
3.	Cipedang	1.814	2.231	23 %
4.	Drunten Wetan	2.031	2.477	22 %
5.	Drunten Kulon	1.963	2.414	23 %
6.	Curug	1.757	2.108	20 %

Sumber: Potensi Desa 1991/1992 dan 2001/2002, diolah kembali.

Universitas Terbuka

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG KONFLIK

HORIZONTAL ANTARPENDUDUK

A. Faktor Pendorong

Perjalanan sejarah sosial masyarakat di berbagai belahan dunia tidak pernah lepas dari konflik, baik yang bersumber dari perbedaan agama maupun disebabkan oleh faktor non keagamaan seperti etnis, politik, ekonomi, dan budaya. Lewis A. Coser (1956) mengemukakan bahwa konflik merupakan kewajaran bagi setiap masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial dan kebudayaan. Demikian pula Thomas Hobbes mengatakan bahwa konflik yang mengarah tindak kekerasan merupakan tindakan alami manusia (*state of nature*).

Dalam konteks penelitian ini pertanyaan yang muncul adalah apakah konflik yang terjadi di tanah air yang muncul sejak tahun 90-an sampai sekarang dipandang sebagai konflik yang wajar dan alami? Seperti diketahui bahwa di tanah air, telah tercatat beberapa peristiwa konflik sosial yang nuansa keagamaannya cukup kentara. Memang, ihwal terjadinya kerusuhan tidak dipicu secara langsung oleh perbedaan agama. Akan tetapi, dengan mengamati perilaku para perusuh yang tidak segan-segan merusak tempat ibadah, seperti masjid, dan gereja, sentimen keagamaan ini tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai salah satu variabel penting yang dapat memicu terjadinya kerusuhan sosial.

Cara pandang sosiologis di atas, yang menempatkan agama sebagai salah satu variabel pembentuk konflik jika dihadapkan dengan cara pandang teologis

terkesan anakronistik. Alasannya, semua agama yang dibawa oleh para utusan Tuhan ke muka bumi ini pada hakikatnya berada dalam misi universal yang sama (Arifin 2001), yaitu pertama, memberikan afirmasi terhadap kebutuhan spiritual manusia terdapat struktur apriori yang esensial yaitu, *sensuous religious*, kepekaan terhadap segala sesuatu yang bersifat Ilahiah. Pemenuhan terhadap kebutuhan ini hanya bisa dilakukan oleh agama. Dilihat dari misi yang pertama ini, agama menurut Tamara dan Hashem (1996) lebih berurusan dengan wilayah *unspeakable* yang melembaga di bagian terdalam diri manusia: hati atau intuisi. Kepekaan hati itulah yang pertama kali memahami arti penting kesadaran akan kehadiran Tuhan, atau bahkan arti penting agama bagi manusia.

Selanjutnya misi yang kedua, agama diharapkan mampu mewartakan terimplementasikannya amal-amal sosial dan kemanusiaan. Dengan begitu, kedekatan hubungan dengan Tuhan tidak hanya dibangun melalui ritus-ritus dan upacara-upacara yang rutin dan ketat, melainkan juga bisa dicapai melalui penciptaan harmoni sosial, pembelaan terhadap keadilan dan penindasan ataupun pengentasan sesama manusia dari keterbelakangan. Dengan demikian dapat dipertegas, bahwa kehadiran agama mengemban misi penyelamatan manusia (*the salvation of man*) dari ketertindasan, kebodohan, ketidakadilan, dan keterbelakangan. Dari misi agama yang begitu mulia tersebut, mengapa agama kadang dikatakan sering menimbulkan konflik? Apakah memang beragama itu untuk konflik, atau adanya *something wrong* dalam keberagamaan kita? Inilah yang seharusnya kita jawab dan dicarikan jalan keluarnya.

Konflik besar memang bisa ditimbulkan oleh agama jika doktrin agama mengeras, yakni kristalnya perasaan dan sikap eksklusif. Sikap ini mengondisikan

para pemeluk agama mengklaim bahwa dirinya paling benar. Bentuk keberagaman semacam ini secara potensial bisa membawa konflik kepada agama lain. Apalagi, sikap eksklusif itu dibenarkan dengan klaim bahwa hanya agama yang dipeluknya adalah yang paling benar, sementara agama lain adalah "jalan yang salah yang membawa pengikutnya kepada kesesatan" seperti sering dirumuskan oleh beberapa teolog. Di samping itu, setiap penganut agama biasanya cenderung membuat standar ganda dalam melihat agama lain. Dalam menilai agama sendiri, biasanya ia memakai standar bahwa agamanyalah yang paling benar menurut standar ideal-normatifnya sendiri. Sementara dalam melihat agama lain, selalu dilihatnya ada sesuatu yang tidak ideal. Standar ganda ini juga sering digunakan untuk menegaskan secara teologis bahwa agama sendiri selalu bersifat konsisten, tanpa pertentangan atau kesalahan sama sekali, asli dari Tuhan, sementara agama lain banyak sekali kontradiksi, inkonsisten, dan merupakan buatan manusia.

Melihat persolan di atas, dapat dikatakan bahwa dalam situasi ekstrem, agama bisa menjadi pendorong terjadinya konflik. Oleh karena itu, isu-isu penting untuk masa depan kemanusiaan, seperti demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, dan perdamaian dunia, tak terjamah oleh agama. Di sinilah pentingnya toleransi dan keterbukaan antarpemeluk agama.

1. Merosotnya Toleransi dan Keterbukaan

Setiap agama sebenarnya menghadapi masalah dilematis ini. Agama Kristen masih terus bergulat dengan doktrin keagamaan seperti *extra ecclesiam nulla salus* (tidak ada keselamatan di luar gereja) walaupun sekarang sudah ada konsep ahlal-kitab, tetapi banyak orang Islam yang memahaminya secara eksklusif, yang

mengklaim bahwa pada dasarnya tidak ada keselamatan di luar agama Islam. Perang lisan melalui perkataan seperti kafir, musyrik, munafik, melabeli agama sebagai *pendorong konflik*.

Sikap keberagamaan yang eksklusif memang memungkinkan terjadinya sikap-sikap ekstrem seperti itu. Studi sosiologis keagamaan dewasa ini telah memperlihatkan kepada kita tentang segi-segi ekstrem pertumbuhan corak keberagamaan yang bersifat kultus dan fundamentalis, yang pada dasarnya berakar dari sikap yang menganggap diri sendiri paling benar. Itu sebabnya, pandangan keagamaan yang terbuka, toleran, dan penuh dengan kelapangan dada, yang dalam agama Islam diistilahkan dengan keberagamaan yang *hanif* adalah sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu, peran agama membentuk sikap pluralisme yang mengakui bahwa agama lain juga sama-sama sah dan mempunyai nilai kebenaran, merupakan suatu keharusan dewasa ini. Maraknya gejala klaim kebenaran dapat berakibat pada terjadinya konflik secara sangat mengerikan. Bahayanya, agama dijadikan justifikasi untuk membenarkan berbagai perbuatan sadis dalam konflik terbuka. Seperti misalnya yang terjadi di Ambon dan entah kapan selesainya. Perjanjian Malino yang sudah disepakati semua pihak ternyata sulit dalam pelaksanaannya.

Peran agama dalam membentuk sikap pluralis tidak dapat hanya mengandalkan bentuk, melainkan esensi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pluralisme di sini bukan hanya sekadar mengatur kehidupan beragama, seperti Orde Baru telah melakukannya dengan buah problem SARA, tetapi memberikan ruang sosial dan politik secara terbuka bagi segala hal yang berkait dengannya.

Dalam konteks peranan agama, pluralisme bukan berarti suatu sikap basa-basi pergaulan sosial, tetapi harus berangkat dari ajaran agama dan dari teologi baru. Inilah perlunya membangun suatu teologi pluralis. Bahkan lebih dari itu, suatu teologi agama-agama. Faham teologi baru yang memberi tempat bagi keabsahan agama lain. Dengan meyakini bahwa di luar agama yang kita yakini pada dasarnya mempunyai kebenaran yang sama walaupun masing-masing agama mempunyai jalan atau tata cara yang berbeda. Islam menyebutnya, perbedaan itu hanyalah dari segi *syariah dan minhaj* saja, jalan yang kesemuanya mengacu kepada Tuhan yang satu. Sebuah faham yang mengajak umat beragama kepada *kalimatun sawa* (titik pertemuan) pada Tuhan, untuk akhirnya sama-sama mengejar kebaikan. Dengan begitu, memang tampaknya sikap pluralis adalah jalan yang paling tepat dewasa ini, di tengah pilihan-pilihan sikap eksklusif, tertentu, bahkan fanatik, dalam melihat hubungan antaragama. Dalam bahasa agama, pluralisme itu bahkan merupakan ketentuan Tuhan agar kita saling mengenal, saling memperkaya sebagai suatu kesatuan umat manusia.

Pluralisme bukan berarti faham yang hendak menyeragamkan keanekaan. Faham ini justru menjunjung tinggi keragaman dan menghargai perbedaan. Titik temu pluralisme bukan pada bentuk leburan untuk manunggal, tetapi pada sikap toleransi terhadap keragaman itu sendiri. Inilah peranan agama yang perlu dikedepankan, kini dan di masa depan, di samping peran-peran lain dalam meningkatkan kualitas keberagaman para pemeluknya. Jika semua itu dapat dilakukan, di masa-masa yang akan datang, kita akan mendapatkan wacana dan praksis agama yang bebas konflik

Menurut YB. Mangunwijaya (Achmad, 2001:32-33), pertikaian di kalangan umat justeru terjadi karena umat lebih mengedepankan perangai luar dari pada ajaran kedamaian dan amanat cinta kasih yang terkandung di dalamnya. Perangai agama pada dasarnya bersifat eksklusif, karena hukum, peraturan dan organisasi sosiologisnya berbeda satu sama lain. Kaum beragama dalam praksisnya justeru lebih banyak menekankan hal ini. Mangunwijaya menyatakan bahwa hakekat beragama sebenarnya berada dalam keimanan. Jika umat beragama menekankan iman yang diekspresikan dalam pengabdian kepada Tuhan, cinta terhadap sesama manusia dan alam semesta, maka tentu tidak mungkin keluar sikap anarkis dan destruktif dalam diri kaum beragama. Oleh karena itu Mangunwijaya lebih menandakan pada faktor internal (keimanan).

Sedangkan menurut Sukidi, Komaruddin Hidayat, dan John Lake (Achmad, 2001:91-103), melihat dari segi faktor eksternal, yakni *political conditioning* dan *setting history*. Ketiga pakar ini melihat bahwa dalam wilayah politik dan kekuasaan, kosa kata "mayoritas" dan "minoritas" atas dasar paradigma agama justeru menjadi kata kunci dengan berbagai dimensi kepentingan yang terselubung, seperti memperkukuh identitas partai dalam rangka meraih simpatisan dan pengikut sebanyak mungkin untuk memenangkan pemilu. Sementara dalam *setting history*, pembentukan mental umat untuk menjadi sentimental dan sensitif reaktif dilakukan, karena di sini yang diasah adalah kepekaan umat untuk saling menilai dan mengamati yang mengkristal menjadi prasangka sosial. Dalam dunia sehari-hari justeru penekanan pada faktor eksternal inilah yang sering menimbulkan konflik horizontal sebagaimana yang sering muncul dalam dua tahun terakhir ini.

Bagaimana mengatasi atau mengantisipasi agar-hal-hal buruk tersebut tidak terulang kembali? Di sinilah diperlukan upaya-upaya penanggulangan kita bersama, dengan cara toleransi dan keterbukaan dalam agama-agama. Selain itu perlu ditumbuhkan semangat pluralitas yang dilandasi cara berfikir positif. Nilai-nilai tersebut merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam mencapai kerukunan hidup umat. Upaya yang ditawarkan antara lain perlunya mengembangkan kerjasama terus-menerus di kalangan kaum beragama dengan berlandaskan pada nilai-nilai universal. Upaya itu juga ditujukan untuk meningkatkan dialog konstruktif yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan bersama dalam mencapai kehidupan harmonis antar umat beragama dalam satu bingkai nasionalisme Indonesia, Pertanyaannya yang muncul dalam konteks penelitian ini adalah bagaimana halnya dengan toleransi dan keterbukaan yang berlangsung selama ini, sudah pudar atau malah sebaliknya keablasan?

Bagaimana tanggapan responden dalam hal aspek toleransi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Toleransi Antar Penduduk

No.	Aspek Toleransi	Kurang (%)	Cukup (%)	Baik (%)
1.	Saling menghormati atau menghargai antar sesama penduduk.	48	28	24
2.	Saling menghargai hak milik orang lain.	50	28	22
3.	Kerukunan kehidupan beragama.	10	66	24
4.	Melaksanakan ibadah secara teratur.	80	20	0
	Rata-rata	47	35,5	17,5

Sumber: Instrumen dan wawancara responden (n=30), Okt-Des 2002.

Meski sebagian besar penduduk (80%) kurang melaksanakan ibadah secara teratur, tingkat kerukunan kehidupan beragama dapat dikatakan cukup baik

(66%). Kondisi demikian ternyata tidak mampu meredam munculnya konflik horizontal. Pemicunya adalah kurangnya saling menghormati atau menghargai antar sesama penduduk (48%). Selain itu kurangnya saling menghargai hak milik orang lain (50%) dapat memicu penjarahan dan pengrusakan.

Bagaimana tanggapan responden dalam hal aspek keterbukaan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.2. Keterbukaan Antar Penduduk

No.	Aspek Keterbukaan	Kurang (%)	Cukup (%)	Baik (%)
1.	Kepemilikan media TV.	9	51	40
2.	Keterbukaan komunikasi.	12	26	62
3.	Kemudahan transportasi.	10	36	54
4.	Kewibawaan para pemimpin.	80	20	0
5.	Keteladanan para pemimpin.	84	16	0
6.	Reformasi.	78	22	0
	Rata-rata	45,5	28,5	26

Sumber: Instrumen dan wawancara (n=30), Okt-Des.2002.

Merasuknya media televisi ke desa-desa yang cukup baik (51%), komunikasi yang terbuka luas (62%), dan transportasi yang mudah (54%) dapat meningkatkan arus informasi, komunikasi dan mobilitas penduduk. Kemajuan (keterbukaan) di berbagai bidang tersebut dapat pula meningkatkan pengetahuan penduduk tentang jalannya reformasi, maupun sepak terjang dari para pemimpin di negeri ini. Karena itu kurang berhasilnya reformasi (78%) di berbagai bidang terutama di bidang ekonomi (terutama kesempatan kerja), hukum (terutama keadilan dan kepastian hukum), dan keamanan (ketentraman dan perlindungan keamanan oleh aparat keamanan), kemudian kurangnya keteladanan (84%) dan kewibawaan (80%) dari para pemimpin di negeri ini dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, termasuk masyarakat di lokasi penelitian ini. Wujud dari ketidakpuasan tersebut kemudian dilampiaskan ke dalam berbagai kerusuhan massal.

2. Pudarnya Sistem Nilai Budaya

Menurut Koentjaraningrat (1990:25) sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup, seperti silaturahmi, persatuan, gotong royong. Oleh karenanya suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi dalam perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya.

Para individu manusia itu sejak kecil telah diresapi nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya sehingga konsepsi-konsepsi itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya tadi sukar diganti dengan nilai-nilai budaya lain dalam waktu yang singkat. Dalam konteks penelitian ini pertanyaan yang mengemuka adalah apakah nilai-nilai budaya seperti silaturahmi, persatuan, dan gotong royong tersebut sudah pudar di kalangan penduduk Indonesia yang notabene adalah bangsa yang ramah, beradab, dan beragama?

Sebenarnya di manakah nilai-nilai budaya daerah Indramayu ketika konflik itu pecah? Menurut Ignas Kleden, kalau pergolakan daerah hendak ditinjau dari perspektif masyarakat transisi atau masa peralihan, dalam bidang kebudayaan, pergolakan di daerah dapat dilihat sebagai akibat mengaburnya nilai-nilai lama, melemahnya pegangan yang diberikan oleh tradisi dan perubahan gaya hidup yang diakibatkan oleh keterbukaan kepada pengaruh-pengaruh dari luar. Sementara itu belum ada nilai-nilai yang diterima secara umum dan belum terbentuk pula pranata-pranata sosial baru yang dapat melembagakan nilai-nilai baru itu.

Dalam bidang politik, pergolakan daerah barangkali saja merupakan akibat dari melemahnya legitimasi pemerintah pusat yang selama ini menjadi titik orientasi bagi politik lokal. Melemahnya legitimasi pemerintah pusat dapat mendorong munculnya pemimpin-pemimpin lokal yang menyuarakan dan mengartikulasikan aspirasi baru yang sebelumnya tidak begitu disadari. Sebenarnya bibit kebangkitan daerah, bibit munculnya otonomi daerah, muncul bersamaan dengan terbentuknya negara kesatuan ini. Berbagai pemberontakan mulai dari Permesta, RMS, Gerakan Papua Merdeka, dan Aceh Merdeka, sudah dimulai jauh sebelum BJ Habibie mempunyai ide untuk memisahkan Timor Timur dari RI, sebuah kebijakan yang makin memberi inspirasi untuk penguatan kedaerahan. Ditambah lagi suasana reformasi dan pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, semangat untuk merdeka di tiap daerah tak tertahankan lagi.

Kekuasaan negara zaman Orde Baru luar biasa kuatnya. Soeharto salah besar dalam mengambil kebijakan dengan mengeluarkan UU No 5/1974 tentang Pemerintahan Daerah dan ditambah dengan UU No 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Menarik juga dikaji, apakah seandainya Polan yang berkuasa waktu itu, akankan ia membuat kebijakan yang lebih baik, yang lebih demokratis? Oleh karena ada satu faktor yang harus diingat, perilaku politik Soeharto sangat dipengaruhi dengan gagasannya tentang pembangunan dan komunis phobia, sebuah monster Franskenstein yang ia ciptakan sendiri.

Ideologi pembangunan era Soeharto erat sekali dengan gagasan modernisasi atau westernisasi, perubahan nilai-nilai lama menjadi kebaratan. Dunia semuanya diarahkan menuju Amerika. Ditirulah teori pertumbuhan ekonomi ala Rostow

yang waktu itu dianggap sebagai kebenaran mutlak sehingga untuk mencapainya segala rintangan dan perbedaan diharamkan. Karena itu syarat pertama yang harus ada adalah stabilitas, dan inilah peluang yang makin memantapkan apa yang disebut dwifungsi ABRI. Dan itulah kesalahan yang paling mendasar. Menurut Tocqueville yang mengamati demokrasi Amerika abad 19, kekuatan politik dan *civil society*-lah yang menjadikan demokrasi di Amerika mempunyai daya tahan. Terwujudnya pluralitas, kemandirian dan kapasitas politik dalam *civil society* menyebabkan warga negara mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara.

Semua telah terlambat. Pada masa Orde Baru, ketika masyarakat menengah ke atas makmur, sementara yang bawah ketakutan karena tekanan militer, semua terlena. Kaum intelektual menyadari ada sesuatu yang salah di negara ini, tetapi tidak mengira kalau dampaknya demikian parah. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Taufik Abdullah mengatakan dirinya tidak menyadari benar dampak sosial kultural dari sistem pemerintah yang sentralistis dan otoriter terhadap kreativitas daerah, bahkan juga terhadap kreativitas pemerintah pusat sendiri.

Melihat konstelasi seperti itu, satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah memperkuat basis kekuatan masyarakat sipil. Bersamaan itu pula segera dilakukan usaha-usaha untuk memulihkan kewibawaan negara yang saat ini dalam kondisi sangat lemah. Seperti dikatakan Ignas Kleden, ketidakpuasan sosial yang semakin meluas saat ini dan pergolakan daerah yang tampaknya mudah saja diprovokasi, bukanlah gejala yang terpisah dan berdiri sendiri, melainkan mempunyai kaitan dengan situasi politik yang lebih makro. "Ini artinya

penanganan konflik lokal tanpa membereskan kelemahan-kelemahan pada tingkat politik makro tidak akan membawa penyelesaian yang bertahan lama, seperti halnya kita tiap hari membersihkan meja makan tanpa membersihkan langit-langit dalam rumah yang penuh debu dan sarang laba-laba," ujarnya.

Dialog Nasional di Langgur yang dihadiri sekitar 2.000 peserta dari seluruh Maluku mencoba menggali titik-titik temu sebagai langkah awal memperkuat basis kekuatan masyarakat sipil. Pendekatan budaya menjadi suatu pilihan yang tepat untuk memberi inspirasi bagi setiap anggota dan komunitas yang bertentangan.

Sebuah budaya dihasilkan jauh sebelum sebuah komunitas bersentuhan dengan negara. Setiap masyarakat tentu menghasilkan sebuah kebudayaan, apa pun juga hasilnya. Dan ketika sebuah kebudayaan itu tercipta, masyarakat itu membuktikan keberadaannya dan ketangguhannya. Hal itulah yang hendak dibangkitkan kembali ketika negara dalam keadaan sangat lemah. Dan benar seperti yang dikatakan Taufik Abdullah, mengkaji kembali unsur-unsur kekuatan dari masyarakat dan tradisi lokal bukan berarti membawa ke masa silam, tetapi menemukan harta yang hilang, dengan harta itulah kita bersama-sama kembali menata kehidupan sosial dan kenegaraan kita.

Konflik secara kasat mata tidak saja, pertentangan antar-kelompok yang besar, seperti yang sempat terjadi di Ambon, Maluku Utara maupun Poso. Tapi konflik juga berpeluang terjadi di lingkungan terkecil, seperti keluarga maupun komunitas dalam masyarakat. Karena harus diakui, konflik itu tidak bisa dihindari.

Pemicu konflik yang ada di masyarakat, demikian tulis harian *Manado Post*, bisa berupa perkelahian antar kampung, perebutan warisan, masalah muda-mudi

dan sebagainya. Dari konflik berskala kecil ini jika sudah melibatkan suku atau pun kelompok yang lebih besar, bisa menimbulkan suatu pertikaian yang besar. Krisis perilaku ini ditandai oleh semakin tingginya angka kriminalitas, penjarahan Mei 1998, tawuran antar pelajar maupun antar pelajar maupun antar kelompok warga masyarakat, *konflik horizontal* masyarakat pada aksi-aksi demonstrasi, pemerkosaan, pembunuhan dan lain-lain sebagainya, membawa pada suatu kekhawatiran akan kehidupan masa depan bangsa.

Bagaimana tanggapan responden dalam hal aspek sistem nilai budaya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.3. Sistem Nilai Budaya Penduduk

No.	Aspek Sistem Nilai Budaya	Kurang (%)	Cukup (%)	Baik (%)
1.	Kepatuhan thd. adat-istiadat/tradisi.	44	36	20
2.	Kerukunan.	40	35	25
3.	Ketenteraman.	45	30	25
4.	Gotong royong.	50	35	15
5.	Musyawarah mufakat.	55	24	21
6.	Mengutamakan kepentingan umum	48	32	20
	Rata-rata	47	32	21

Sumber: Instrumen dan wawancara responden (n=30), Okt-Des.2002.

Kurangnya kepatuhan terhadap adat istiadat/tradisi, kurangnya kerukunan, kurangnya ketenteraman, kurangnya gotong royong, kurangnya musyawarah mufakat, dan kurangnya mengutamakan kepentingan umum, yang rata-rata mencapai (47%) menunjukkan bahwa sistem nilai budaya yang merupakan pedoman tertinggi dalam perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya mengalami kemerosotan (pudar) di kalangan penduduk ini. Pudarnya sistem nilai budaya tersebut dapat memicu munculnya konflik horizontal.

3. Sikap Mental (*Attitude*) Destruktif atau Anarkis

Menurut Koentjaraningrat (1990:26) sikap adalah suatu disposisi atau keadaan mental di dalam jiwa dari seorang individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya, baik lingkungan manusia atau masyarakatnya maupun lingkungan alam. Meskipun berada di dalam diri seorang individu, sikap itu biasanya dipengaruhi oleh nilai budaya. Dalam konteks penelitian ini pertanyaannya adalah apakah sikap destruktif dan anarkis tersebut merupakan sikap mental masyarakat kita?

Bagaimana tanggapan responden dalam hal aspek sikap mental destruktif dan anarkis dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.4. Sikap Mental (*Attitude*) Destruktif dan Anarkis Penduduk

No.	Aspek Sikap Mental Destruktif dan Anarkis	Kurang (%)	Cukup (%)	Baik (%)
1.	Prilaku "bringas" (kasar).	16	54	32
2.	Arogansi (sombong).	24	49	27
3.	Persaingan yang tak sehat.	26	52	22
	Rata-rata	22	51	27

Sumber: Instrumen dan wawancara responden (n=30), Okt-Des.2002.

Cukup tingginya prilaku "bringas" (kasar), cukup tingginya sikap arogansi (sombong), dan cukup tingginya persaingan yang tak sehat, yang rata-rata mencapai (51%) menunjukkan bahwa sikap mental destruktif dan anarkis yang berupa kerusuhan massal, penjarahan, dan mencederai pihak lain (bahkan sampai ada yang terbunuh) yang merupakan prilaku yang tak terpuji itu sudah merasuk di kalangan penduduk ini.

4. Krisis Akhlak atau Moral

Menurut Sarjono Jatiman (Republika, 30 Agustus, hal.9) bangsa Indonesia ini sedang dilanda krisis akhlak atau moral. Pemicunya tidak hanya bersumber

dari sistem pendidikan yang selama ini dikembangkan, seperti pendidikan akhlak tidak lagi masuk dalam kurikulum sekolah sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah dasar hingga sekolah menengah, tetapi juga bersumber dari perilaku yang dicontohkan para elit politik yang memperlihatkan secara kasat mata berbagai konflik kepentingan, perebutan kekuasaan, dan budaya KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) yang masih terus terjadi. Pertanyaannya adalah sejauhmana pernyataan Jatiman tersebut dapat diterima?

Selain itu Kelemahan penegakan hukum di Indonesia dinilai kalangan akademisi *mendorong konflik* horizontal.

Bagaimana tanggapan responden dalam hal aspek akhlak atau moral dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.5. Akhlak atau Moral Penduduk

No.	Aspek Akhlak atau Moral Penduduk	Kurang (%)	Cukup (%)	Baik (%)
1.	Kesadaran tentang perilaku baik dan buruk.	26	46	28
2.	Kesadaran tentang norma/moral, tetapi bertindak menentangnya (<i>immoral</i>).	24	58	18
3.	Hilangnya kesadaran tentang nilai baik dan buruk (<i>amoral</i>).	37	43	20
	Rata-rata	29	49	22

Sumber: Instrumen dan wawancara (n=30), Okt-Des.2002.

Yang menarik dalam aspek pertama, adalah cukup besarnya kesadaran tentang perilaku baik dan buruk (46%), ternyata tidak diikuti dengan tindakannya. Ternyata bahwa aspek kedua, yaitu kesadaran tentang norma/moral, tetapi bertindak menentangnya (*immoral*) di lokasi penelitian ini cukup besar (58%). Demikian pula halnya dalam hal aspek ketiga, yaitu hilangnya kesadaran tentang nilai baik dan buruk (*amoral*), ternyata cukup besar pula mencapai sekitar 43%. Jadi

memang logis bila disimpulkan bahwa masyarakat setidaknya di lokasi penelitian ini sedang dilanda krisis akhlak atau moral.

5. Kesenjangan Sosial ekonomi

Menurut Kasdin Sihotang dalam artikelnya yang berjudul: Menggagas Paradigma Kerukunan (Kompas, 24 September, hal.33). kesenjangan sosial ekonomi tidak jarang juga menjadi pemicu dari konflik horizontal. Ditambahkannya terlebih lagi dalam era pasca Orde Baru ini dimana tingkat pengangguran semakin meningkat (lebih dari 27 juta orang angkatan kerja), sedangkan kesempatan kerja semakin kecil. Pertanyaan yang muncul di sini adalah apakah kesenjangan sosial ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya menimbulkan berbagai konflik horizontal?

Konflik selalu ada dalam kehidupan manusia sesuai dengan kodratnya. Bahkan sepanjang peradaban manusia di muka bumi ini konflik kerap kali muncul dalam kehidupan mereka. Manusia sebagai bagian dari masyarakat dimanapun mereka tinggal akan senantiasa menghadapi kemungkinan terjadinya konflik, karena setiap manusia itu unik, mempunyai aspirasi, keinginan, dan kepentingan masing-masing. Bagaimanapun homogenya suatu masyarakat atau kelompok sosial, konflik pasti hadir. Benturan antara berbagai kepentingan itulah yang kerap memicu munculnya konflik. Konflik umumnya dianggap sebagai sesuatu yang tidak fungsional. Suatu sistem, pranata, atau institusi yang kerap mengalami konflik dinilai sebagai sesuatu yang tidak harmonis.

Dari perspektif fungsionalisme sebagai kerangka penglihatan, dapat dikemukakan bahwa masyarakat sebagai suatu sistem yang stabil dan selalu mengandung keseimbangan. Kalaupun terjadi perubahan, memang akan

mengganggu keseimbangan. Namun demikian perubahan ini sifatnya sementara, dan kemudian terjadi keseimbangan kembali. Akan tetapi ketidakmampuan perspektif fungsionalisme menjelaskan konflik, ketidakharmonisan, dan perang antarkelas, menunjukkan bahwa sebagai pendekatan teoritis, fungsionalisme memiliki keterbatasan. Teori konflik sebagai reaksi terhadap fungsionalisme pada tahun 1950-an dan 1960-an mengemukakan bahwa masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok yang bertikai yang sering bertempur habis-habisan, bukannya sebagai keluarga besar yang bahagia. Menurut para ahli teori konflik, fokus utama seluruh aktivitas sosial adalah konflik atas tanah, sumber daya, kemakmuran, alat produksi, air, perumahan, pendidikan, dan sebagainya. Kepemilikan tanah yang tidak seimbang (polarisasi), dan ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya dapat memunculkan kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan ekonomi dapat pula terjadi sebagai akibat meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan tersedianya lapangan kerja. Kesenjangan sosial ekonomi tersebut pada akhirnya memunculkan konflik horizontal.

Sebagai gambaran kondisi angkatan kerja di lokasi penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

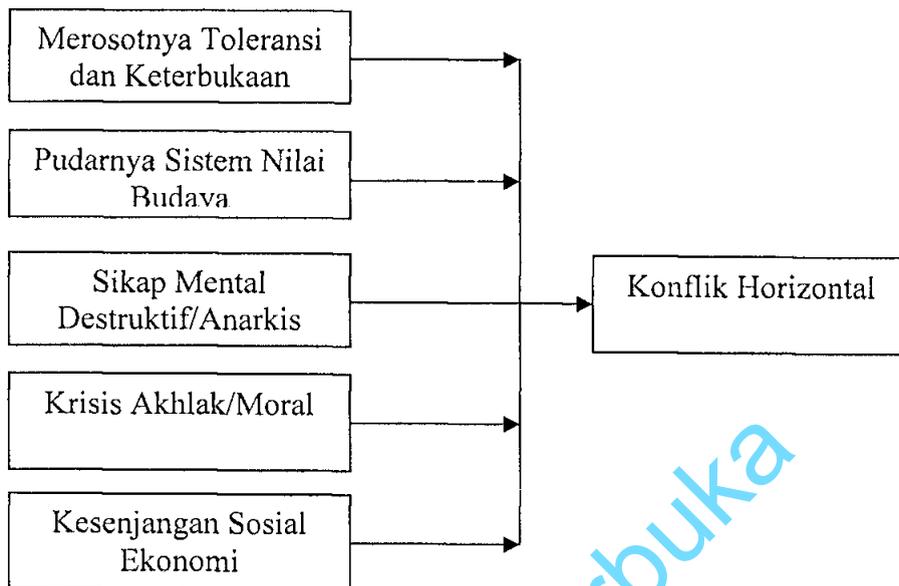
Tabel 4.6.

Jumlah Angkatan Kerja Menurut Status Pekerjaan, Tahun 2001.

No.	Nama Desa	Jumlah Jiwa	Bekerja (%)	Tdk Bekerja (%)
1.	Margamulya	5.325	54	46
2.	Sidamulya	5.680	59	41
3.	Cipedang	4.658	59	41
4.	Drunten Wetan	5.120	58	42
5.	Drunten Kulon	4.840	56	44
6.	Curug	4.340	55	45
	Jumlah	29.963	56,83	43,17

Sumber: Monografi Desa 2001, diolah kembali.

Secara ringkas faktor-faktor penyebab Konflik Horizontal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar: Alur konflik Horizontal

B. Akibat Konflik Horizontal

Sebagai gambaran dikemukakan macam-macam korban berupa harta benda akibat kerusuhan massa sebagai berikut:

Tabel 4.7.

Korban (harta) dan Jumlah Kerugian Akibat Konflik H., 2000-2002

No	Nama desa	Macam Korban (Harta)				Jumlah Kerugian (juta Rp)
		Rumah	Warung/ Toko	Sepeda Motor	Perahu Motor	
1.	Margamulya	37	8	5	6	450
2.	Sidamulya	12	7	6	0	500
3.	Cipedang	25	6	4	0	775
4.	Drunten Wetan	14	4	5	0	300
5.	Drunten Kulon	11	4	3	0	400
6.	Curug	9	3	3	0	200
	Jumlah	108	32	26	6	2.625

Sumber: Wawancara dengan Petugas Polsek Kandanghaur, dan Gabuswetan 2000-2002, diolah kembali.

Selain, korban harta benda milik pribadi penduduk, juga terdapat korban fasilitas umum, 4 jabatan dirusak/diputus, 1 pasar tradisional di rusak. Sedangkan korban manusia akibat kerusuhan massa tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Korban (Manusia) Akibat Konflik Horizontal, 2000-2002

No	Nama Desa	Macam Korban (Jiwa)		
		Luka ringan	Luka Berat	Jiwa
1.	Margamulya	42	7	2
2.	Sidamulya	20	3	0
3.	Cipedang	30	4	1
4.	Drunten Wetan	34	5	1
5.	Drunten Kulon	28	4	1
6.	Curug	22	3	1
	Jumlah	176	26	6

Sumber: Wawancara dengan Petugas Polsek Kandanghaur, dan Gabuswetan 2000-2002, diolah kembali.

Universitas Terbuka

BAB V

UPAYA PENANGANAN KONFLIK HORIZONTAL

ANTAR PENDUDUK

Pemerintah Tak Berdaya Cegah Konflik Horizontal. Menurut Mayjen TNI A Syarnubi Hasyim, Deputi Bidang Pengkajian Lemhannas, bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi perubahan sosial yang ditandai dengan krisis multidimensional yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Sinar Harapan 7-10-2002). Dikatakannya implikasi tersebut tampak jelas dengan berkembangnya tuntutan aspirasi yang berlebihan dan timbulnya semangat primordialisme dan munculnya konflik horizontal di berbagai daerah yang menyebabkan instabilitas nasional. "Pemerintah di era reformasi yang dianggap sangat legitimate, ternyata belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi bangsa secara menyeluruh. Lemahnya posisi pemerintah di era transisi ini seolah tidak berdaya dalam mencegah dan menanggulangi konflik horizontal yang terjadi di berbagai daerah". Di tengah kondisi tersebut, peran aktif masyarakat menjadi sangat penting, sebab ketahanan sosial masyarakat mustahil dapat terwujud tanpa mendapat dukungan dari masyarakat. Dalam membangun ketahanan sosial masyarakat hendaknya didasarkan pada solidaritas sosial yang bersifat filosofis bukan atas dasar ikatan kepentingan politik maupun ekonomi. Oleh sebab itu dibutuhkan konsepsi yang menyeluruh yang bersifat komprehensif dan integral untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan ketahanan sosial masyarakat.

Lemhannas secara kelembagaan *concern* terhadap masalah ketahanan sosial masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kajian tentang masalah etnis,

kependudukan dan sosial budaya. Oleh karena itu menurut A. Syarnubi Hasyim mengembangkan ketahanan sosial masyarakat harus tetap berpijak pada nilai-nilai budaya bangsa. Meski berbagai teori ilmiah telah dilontarkan para ilmuwan bangsa lain, namun dasar membangun ketahanan sosial masyarakat tidak bisa serta merta menjiplak konsep dari bangsa lain yang belum tentu sama nilai kepribadian dan budaya bangsa Indonesia.

Sementara itu Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah lebih menekankan pada masalah krisis sosial. Menurutnya, krisis sosial merupakan bagian dari krisis multidimensional yang berdampak pada dimensi-dimensi kehidupan sosial masyarakat dan secara makro juga berpengaruh pada kehidupan berbangsa.

Berbagai upaya telah dan akan dilakukan oleh berbagai kalangan untuk mengatasi akibat yang dapat ditimbulkannya. Namun disadari bahwa ternyata kemampuan yang dimiliki kurang sebanding dengan besaran dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Ada beberapa hal yang merupakan indikasi terjadinya krisis sosial. *Pertama*, orang atau kelompok orang mudah terpancing untuk melakukan tindakan anarkis, kekerasan dan amoral. *Kedua*, orang atau kelompok orang mudah terpancing untuk berkonflik, kurang menyadari adanya perbedaan dan relatif kecilnya media dialog dijadikan sebagai jalan keluar. *Ketiga*, semakin menipisnya nilai dan sikap tolong menolong, solidaritas sosial dan kesetiakawanan sosial. *Keempat*, semakin merenggangnya ikatan-ikatan sosial dan semangat kebersamaan di antara anggota masyarakat.

Menurut Mensos fenomena-fenomena tersebut layak mendapat perhatian khusus karena terkait dengan masalah ketahanan sosial masyarakat, walaupun

masih perlu menjadi pemikiran apakah ketahanan sosial masyarakat yang menyebabkan terjadinya krisis sosial atau krisis sosial yang menyebabkan rentannya ketahanan sosial masyarakat. Konsep ketahanan sosial merupakan suatu konsep yang relatif baru bila dibandingkan dengan konsep ketahanan pangan, politik dan ekonomi. Oleh karena itu masih sedikit ditemukan tentang konsep ketahanan sosial masyarakat dalam berbagai literatur atau buku acuan lainnya. Dikemukakan pula bahwa konsep ketahanan sosial merupakan bagian yang tidak terpisah dari konsep ketahanan sosial yang mencakup berbagai aspek ideologi, politik, sosial ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan.

Menurut M. Baikuni karakteristik negara kepulauan dan keragaman dinamika masyarakat Indonesia yang dirumuskan dalam *Bhinneka Tunggal Ika*, seyogyanya menjadi titik tolak dalam penanganan konflik, termasuk konflik horizontal.

Perubahan dinamis juga terjadi berkaitan dengan dinamika penduduk dan tenaga kerja di masing-masing propinsi. Migrasi besar-besaran terjadi dari desa menuju kota terutama mulai tahun 1970an ketika industrialisasi mulai dikembangkan secara besar-besaran. Kota-kota di Jawa mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi, terutama akibat kedatangan penduduk dari berbagai propinsi termasuk dari luar Jawa. Sementara itu program transmigrasi yang memindahkan penduduk miskin dari Jawa ke sejumlah propinsi luar Jawa, dinilai secara demografis telah gagal. Bahkan setelah krisis, berbagai kesenjangan yang terjadi berubah menjadi konflik antara transmigran dengan penduduk asli, ini berarti secara sosial budaya tidak terintegrasi dan secara politis juga tidak harmonis.

Perubahan struktur tenaga-kerjaan dari sektor pertanian ke non-pertanian, baik manufaktur dan jasa, terjadi sangat cepat di sejumlah propinsi terutama di Jawa dan Bali. Sementara itu tenaga kerja terdidik dari Jawa banyak juga yang bekerja di sejumlah propinsi yang memiliki industri dan pertambangan yang dimiliki investasi asing maupun nasional. Penduduk pendatang yang menduduki posisi penting, menguasai aset produktif dan kegiatan ekonomi di sejumlah propinsi, telah mengakibatkan kecemburuan sosial yang kemudian memicu konflik. Sebagai contoh tenaga kerja di sejumlah perusahaan besar di Aceh dan Kalimantan Timur banyak dikuasai oleh para pendatang dari Jawa, demikian pula kasus Ambon salah satu pemicunya adalah kecemburuan penduduk suku lokal ambon terhadap pendatang dari Bugis, Buton dan Makasar yang banyak memegang kunci kegiatan dan jaringan ekonomi. Mengutip pendapat Martin van Bruinessen, persoalan *konflik horizontal* di berbagai daerah bukan SARA, tetapi lebih pada masalah kesenjangan ekonomi dan persoalan rasa keadilan.

Hubungan pusat daerah yang didominasi oleh Jakarta, telah mengakibatkan ketimpangan antar propinsi semakin nyata. Pembangunan selama rezim Orde Baru yang sentralistik telah membawa implikasi penyeragaman kebijakan yang harus diterapkan pada kondisi wilayah yang beragam. Pemerintah pusat sebagai penentu, cenderung ingin menyeragamkan prosedur dan standar program dan proyek pembangunan, yang direncanakan di pusat bagi pelaksanaan seluruh daerah. Dibawah rezim sentralistik, yang terjadi justru penghisapan nilai tambah dari daerah ke pusat. Proses ini diikuti dengan kesenjangan antar wilayah Jawa versus Luar Jawa, Kawasan Barat versus Kawasan Timur, kota versus desa. Sebagai akibatnya begitu rezim ini jatuh, munculah mosi tidak percaya pada pusat

dan desakan untuk otonomi terutama propinsi pinggiran (*periphery region*) yang selama ini mengalami ketidak-adilan.

Kecenderungan perubahan dan kebijakan pembangunan secara jelas telah mempengaruhi pola pertumbuhan ekonomi, dinamika sektoral, perubahan struktur tenaga kerja dan distribusi pendapatan, maupun interaksi antar daerah termasuk dengan pusat. Kecenderungan perubahan global akan mempengaruhi perubahan yang mendasar sampai pada tingkat lokal. Sejumlah propinsi secara cepat akan terintegrasi dengan pasar global, paling tidak terkait dengan pasar regional diantara negara-negara tetangga ASEAN.

Hingga saat ini di Indonesia, setelah tumbanganya rezim orde baru sering dilanda konflik di berbagai bidang. Berbagai konflik tersebut bermuara pada persoalan etnis, agama, ras dan budaya. Untuk itu perlu dicari solusi yang tepat agar konflik yang sudah memakan waktu lama atau berkepanjangan ini dapat segera diatasi. Konflik yang sudah terlanjur muncul di masyarakat dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:

Konflik yang bersifat majemuk horizontal, yaitu konflik yang timbul dalam masyarakat yang struktur atau pelapisan sosialnya terpolarisasi menurut pemikiran, kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan, maka alternatif penyelesaian konflik yang dapat dilakukan adalah mengurangi disparitas (perbedaan) di antara kedua belah pihak. Konflik yang terjadi menyangkut kekayaan, maka alternatif penyelesaian konfliknya adalah bagaimana kekayaan itu mampu didistribusikan secara merata. Sedangkan bila konflik itu menyangkut kekuasaan, maka alternatif penyelesaian konfliknya adalah melakukan prinsip proporsionalitas, yakni posisi-posisi pemerintahan yang terpenting didistribusikan

kepada golongan-golongan masyarakat sesuai dengan perbandingan jumlah penduduk secara keseluruhan.

Konflik yang menyangkut kurangnya saluran komunikasi politik, maka alternatif penyelesaian konflik yang dapat ditempuh adalah bagaimana proses penyaluran aspirasi, komentar, partisipasi dan unek-unek masyarakat bisa dilakukan. Seperti disinyalir, selama ini diindikasikan adanya kekuatan besar negara disatu pihak dan ketidakberdayaan masyarakat di pihak lain menyebabkan tersumbatnya saluran komunikasi politik. Hal tersebut menyebabkan timbulnya sistem politik yang kaku dengan tidak adanya peluang kemandirian masyarakat. Akibatnya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pemerintah akan terpinggirkan.

Selain dengan ketiga cara tersebut di atas, Hendropuspito (1989) mengemukakan empat cara lain yang dapat dilakukan di dalam penanganan konflik etnis, yaitu melalui konsiliasi, mediasi, arbitasi, dan detente.

1. Konsiliasi

Penanganan konflik horizontal antara penduduk yang pernah dilakukan di lokasi penelitian ini adalah *konsiliasi* atau perdamaian, yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. Dalam proses konsiliasi ini kedua pihak yang berselisih meminta bantuan kepada pihak ketiga (aparatur Desa, aparat kecamatan, aparat kepolisian, dan tokoh-tokoh masyarakat) untuk memberikan berbagai pertimbangan yang dianggap baik bagi kedua belah pihak untuk menghentikan sengketanya.

Hasil perdamaian itu menghasilkan kesepakatan yang intinya menyerukan perdamaian sekaligus menghentikan segala bentuk kekerasan, khususnya di desa-desa yang mengalami pertikaian. Kini dapat kita amati setidaknya di desa-desa yang sebelumnya bersengketa, kini relatif minoritas dan tidak mengalami perlakuan balas dendam oleh pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Mereka sadar konflik tidak perlu diperluas. Sepatutnya kita mendorong agar dialog semacam itu terus dibudayakan. Tentu saja akan lebih baik lagi bila dialog semacam ini dilakukan sebelum terjadinya konflik.

2. Mediasi

Selain dengan cara konsiliasi, penanganan konflik di lokasi penelitian ini juga dilakukan dengan cara *mediasi*, yaitu suatu cara menyelesaikan suatu pertikaian dengan menggunakan perantara (mediator). Di sini mediator memberikan konsultasi kepada pihak-pihak yang bertikai, jadi perannya lebih bersifat konsultatif, dan tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak-pihak yang bersengketa itulah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan. Jadi peran mediator di sini hampir sama dengan peran konsiliator.

Konsiliator biasanya berasal dari pihak yang masih memiliki ikatan fungsi struktural, seperti pemerintah. Sedangkan mediator bisa berasal dari pihak yang tidak memiliki ikatan fungsi struktural, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kepedulian pihak-pihak yang tidak terlibat sengketa, seperti LSM sangat penting untuk menjembatani kebuntuan penyelesaian konflik. Peran seperti ini telah dilakukan LSM yang ada di kota Indramayu. Persyaratan penting yang

harus dimiliki mediator adalah harus memiliki citra yang baik, dan bersifat netral. Yang penting dalam menyelesaikan konflik, hendaknya jangan dititikberatkan pada akar permasalahan konflik, tetapi hendaknya lebih mengedepankan pada penyelesaian konflik itu sendiri. Hal ini untuk menghindari agar forum ini terhindar dari ajang saling mendiskreditkan di antara pihak-pihak yang bertikai.

Penyelesaian konflik di masa Orde Baru dilakukan dengan pendekatan keamanan, dan tidak sampai pada akar permasalahan. Akibatnya ketika pemerintah tampak mengendor, maka konflik muncul kembali, seperti kasus konflik etnis Madura dan dayak yang sudah berlangsung berkali-kali.

Di lokasi penelitian ini tidak terjadi bentuk penanganan konflik dengan cara paksaan (*coersion*), yakni suatu cara untuk menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik ataupun psikologis. Hal ini karena hanya akan memperpanjang konflik menjadi tidak berkesudahan, mereka mau berdamai karena keterpaksaan, belum tentu karena kesadarannya. Kondisi demikian ini berpotensi konflik, dan sewaktu-waktu akan muncul kembali.

Kini di era globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi, golongan minoritas, baik yang seetnis maupun yang senasib dapat dengan mudah menggalang kekuatan di luar daerah atau di luar negeri. Golongan minoritas ini tidak mustahil pada akhirnya dapat memukul balik golongan mayoritas. Oleh karena itu model penyelesaian konflik melalui paksaan ini tampaknya sudah harus ditinggalkan karena menyimpan potensi konflik yang lebih besar.

3. Detente

Bentuk penanganan konflik lainnya yang pernah dilakukan di lokasi penelitian ini adalah dengan cara *detente* (mengendorkan), yaitu mengurangi hubungan tegang antara dua pihak yang bertikai. Model penyelesaian konflik ini dilakukan sebagai persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah-langkah mencapai perdamaian. Dengan demikian belum ada penyelesaian yang bersifat definitif, karena belum ada pihak yang dinyatakan menang atau kalah. Dalam prakteknya *detente* sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bertikai sebagai peluang untuk memperkuat diri masing-masing melalui perang urat saraf. Dalam perang fisik, *detente* ini sering disebut sebagai *gencatan senjata*. Lama masa *gencatan senjata* ini tidak tentu. Apabila masing-masing pihak merasa dirinya lebih kuat, biasanya mereka tidak melangkah ke meja perundingan, melainkan maju ke medan perang kembali. Di lokasi penelitian ini, *detente* dapat diberlakukan dengan catatan pada masa pengendoran harus dicermati agar mereka tidak saling menyusun kekuatan seperti menghimpun senjata tajam ataupun senjata api. Sebaliknya diciptakan suasana yang kondusif yang memungkinkan mereka untuk saling mempercayai.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Merosotnya Toleransi dan Keterbukaan

Konflik horizontal di kalangan umat justeru terjadi karena umat lebih mengedepankan perangai luar dari pada ajaran kedamaian dan amanat cinta kasih yang terkandung di dalamnya. Hakekat beragama sebenarnya berada dalam keimanan. Sikap anarkis dan destruktif dalam diri kaum beragama tidak mungkin keluar pada umat beriman yang diekspresikan dalam pengabdian kepada Tuhan, cinta terhadap sesama manusia dan alam semesta.

Akan tetapi dalam *setting history*, pembentukan mental umat untuk menjadi sentimental dan sensitif reaktif dilakukan. Dalam *setting* ini yang diasah adalah kepekaan umat untuk saling menilai dan mengamati yang mengkristal menjadi prasangka sosial. Dalam dunia sehari-hari justru penekanan pada faktor eksternal inilah yang sering menimbulkan konflik horizontal sebagaimana yang sering muncul belakangan ini.

Untuk itu diperlukan upaya-upaya penanggulangan, dengan cara toleransi dan keterbukaan dalam umat beragama. Selain itu perlu ditumbuhkan semangat pluralitas yang dilandasi cara berfikir positif. Nilai-nilai tersebut merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam mencapai kerukunan hidup umat.

Dalam hal toleransi, di desa-desa penelitian meski sebagian besar penduduk (80%) kurang melaksanakan ibadah secara teratur, bahkan tingkat kerukunan kehidupan beragama dapat dikatakan cukup baik (66%). Namun ternyata tidak mampu meredam munculnya konflik horizontal. Pemicunya adalah kurangnya saling menghormati atau menghargai antar sesama penduduk (48%), dan kurangnya saling menghargai hak milik orang lain (50%). Kondisi demikian dapat memicu penjarahan dan pengrusakan.

Sedangkan dalam hal aspek keterbukaan antarpenduduk dapat disimpulkan bahwa merasuknya media televisi ke desa-desa yang cukup baik (51%), komunikasi yang terbuka luas (62%), dan transportasi yang mudah (54%) dapat meningkatkan arus informasi, komunikasi dan mobilitas penduduk. Kemajuan (keterbukaan) di berbagai bidang tersebut dapat pula meningkatkan pengetahuan penduduk tentang jalannya reformasi, maupun sepak terjang dari para pemimpin di negeri ini. Karena itu kurang berhasilnya reformasi (78%) di berbagai bidang terutama di bidang ekonomi (terutama kesempatan kerja), hukum (terutama keadilan dan kepastian hukum), dan keamanan (ketentraman dan perlindungan keamanan oleh aparat keamanan), kemudian kurangnya keteladanan (84%) dan kewibawaan (80%) dari para pemimpin di negeri ini dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, termasuk masyarakat di lokasi penelitian ini. Wujud dari ketidakpuasan tersebut kemudian dilampiaskan ke dalam berbagai kerusuhan massal.

2. Pudarnya Sistem Nilai Budaya

Sistem nilai budaya yang terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup berfungsi sebagai pedoman tertinggi dalam perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya.

Para individu manusia itu sejak kecil telah diresapi nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya sehingga konsepsi-konsepsi itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya tadi sukar diganti dengan nilai-nilai budaya lain dalam waktu yang singkat.

Dalam hal aspek sistem nilai budaya dapat disimpulkan sebagai berikut: kurangnya kepatuhan terhadap adat istiadat/tradisi, kurangnya kerukunan, kurangnya ketenteraman, kurangnya gotong royong, kurangnya musyawarah mufakat, dan kurangnya mengutamakan kepentingan umum, yang rata-rata mencapai (47%) menunjukkan bahwa sistem nilai budaya yang merupakan pedoman tertinggi dalam perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya mengalami kemerosotan (pudar) di kalangan penduduk ini. Pudarnya sistem nilai budaya tersebut dapat memicu munculnya konflik horizontal.

3. Sikap Mental (Attitude) Destruktif/Anarkis

Sikap sebagai suatu keadaan mental di dalam jiwa dari seorang individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Meskipun berada di dalam diri seorang individu, sikap itu biasanya dipengaruhi oleh nilai budaya.

Dalam hal aspek sikap mental destruktif dan anarkis dapat disimpulkan bahwa Cukup tingginya perilaku "bringas" (kasar), cukup tingginya sikap arogansi (sombong), dan cukup tingginya persaingan yang tak sehat, yang rata-rata

mencapai (51%) menunjukkan bahwa sikap mental destruktif dan anarkis yang berupa kerusuhan massal, penjarahan, dan mencederai pihak lain (bahkan sampai ada yang terbunuh) yang merupakan perilaku yang tak terpuji itu sudah merasuk di kalangan penduduk ini.

4. Krisis Akhlak atau Moral

Masyarakat terutama di lokasi penelitian ini sedang dilanda krisis akhlak atau moral. Pemicunya tidak hanya bersumber dari pendidikan akhlak yang tidak lagi masuk dalam kurikulum sekolah sebagai mata pelajaran wajib, tetapi juga bersumber dari perilaku yang dicontohkan para elit politik yang memperlihatkan secara kasat mata berbagai konflik kepentingan, perebutan kekuasaan, dan budaya KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) yang masih terus terjadi.

Ternyata bahwa aspek kesadaran tentang norma/moral, tetapi bertindak menentangnya (*immoral*) di lokasi penelitian ini cukup besar (58%). Demikian pula halnya dalam hal aspek hilangnya kesadaran tentang nilai baik dan buruk (*amoral*), ternyata cukup besar pula mencapai sekitar 43%. Yang menarik adalah cukup besarnya kesadaran tentang perilaku baik dan buruk (46%), ternyata tidak diikuti dengan tindakannya.

5. Kesenjangan Sosial ekonomi

Kesenjangan sosial ekonomi tidak jarang juga menjadi pemicu dari konflik horizontal. Tingkat pengangguran semakin meningkat (lebih dari 27 juta orang angkatan kerja), sedangkan kesempatan kerja semakin kecil.

Fokus utama seluruh aktivitas sosial adalah konflik atas tanah, sumber daya, kemakmuran, alat produksi, air, perumahan, pendidikan, dan sebagainya. Kepemilikan tanah yang tidak seimbang (polarisasi), dan ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya dapat memunculkan kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan ekonomi dapat pula terjadi sebagai akibat meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan tersedianya lapangan kerja. Kesenjangan sosial ekonomi tersebut pada akhirnya memunculkan konflik horizontal.

B. SARAN-SARAN

1. Perlu mengembangkan kerjasama terus-menerus di kalangan masyarakat dengan berlandaskan pada nilai-nilai universal. Upaya itu juga ditujukan untuk meningkatkan dialog konstruktif yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan bersama dalam mencapai kehidupan harmonis antar golongan masyarakat dalam satu bingkai nasionalisme Indonesia.
2. Pendidikan akhlak perlu dimasukkan kembali dalam kurikulum sekolah dari tingkat pendidikan dasar hingga menengah sebagai mata pelajaran wajib.
3. Para elit politik wajib memberikan contoh keteladanan prilaku yang tidak lagi memperlihatkan konflik kepentingan, perebutan kekuasaan, dan budaya KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme).
4. Pemerintah perlu menyediakan kesempatan kerja yang luas untuk menampung meningkatnya jumlah angkatan kerja.
5. Tindakan hukum terhadap para pelaku kejahatan (kriminal) termasuk yang bertindak destruktif/anarkis harus dilakukan tanpa pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Coser, Lewis A., 1964, *The Functions of Social Conflict*, New York, The Free Press.
2. Kasdin Sihotang dalam Artikel yang berjudul: *Menggagas Paradigma Kerukunan*, Kompas, 24 September 2001, halaman 33.
3. Koentjaraningrat, 1990, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan (Bunga Rampai)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
4. Mangunwijaya, YB., 2001, dalam Achmad (editor): *Pluralitas Agama*, Jakarta, Kompas.
5. Moleong, Lexy J., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
6. Muliana, Yuyun, dalam Artikel yang berjudul: *Bukan Tawuran tapi "Perang Pelajar"*, Republika, 30 Agustus 1999, halaman 9.
7. Sukidi, DKK., 2001, dalam Achmad (editor): *Pluralitas Agama*, Jakarta, Kompas.
8. Sunarto, Kamanto, 1993, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
9. Surata, Agus dan Tuhanā T.A., 2001, *Atasi Konflik Etnis*, Yogyakarta, Global Pustaka Utama.